

## BAB III

### KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 diperkirakan meningkat pada kisaran 5,2-5,5 persen, sejalan dengan akselerasi konsumsi masyarakat dan investasi ditengah tetap terjaganya belanja fiskal pemerintah dan tingginya potensi ekspor. Optimisme ekonomi tahun 2022 didorong oleh aktivitas ekonomi yang terus meningkat sejalan dengan percepatan vaksinasi, pembukaan ekonomi yang semakin luas dan stimulus kebijakan yang berlanjut. Meski demikian, target pemulihan tersebut masih dihadapkan pada risiko penyebaran varian baru COVID-19, permanent scar yang dialami oleh dunia usaha dan sosial, normalisasi kebijakan baik fiskal dan moneter, serta gangguan rantai pasok dan krisis energi.

Keberhasilan pengendalian COVID-19 dan kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat dan dunia usaha yang kemudian akan dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. Komponen konsumsi masyarakat diperkirakan meningkat dengan tumbuh sebesar 5,0-5,2 persen, ditopang oleh terkendalinya penyebaran COVID-19 seiring dengan tercapainya imunitas massal dan berangsur pulihnya mobilitas masyarakat.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didukung oleh sejumlah sektor yang diperkirakan tumbuh kuat, seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Industri pengolahan diperkirakan menjadi motor penggerak pertumbuhan didukung oleh keberlanjutan pengembangan 7 sektor prioritas (makanan dan minuman, tekstil, kimia, otomotif, elektronika, farmasi dan alat kesehatan) serta peningkatan permintaan baik dari domestik maupun eksternal.

Pemulihan ekonomi yang kuat disertai dengan agenda reformasi struktural pada tahun 2022 diperkirakan memberikan dampak positif bagi pencapaian sasaran pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2022 tumbuh sebesar 5,01 persen, hal ini menunjukkan membaiknya kondisi ekonomi masyarakat jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi nasional triwulan I tahun 2021 pada angka minus 0,74 persen. Kondisi perekonomian masyarakat diyakini akan mendekati kondisi normal pada tahun 2022 dan menjadi pondasi kuat untuk melakukan akselerasi pencapaian target pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 menekankan pada peningkatan produktivitas untuk

transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema RKP Tahun 2023 disusun sebagai respon terhadap momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi positif pada tahun 2021 dan triwulan I tahun 2022. Transformasi ekonomi Indonesia akan sangat tergantung pada kebijakan peningkatan produktivitas terutama dalam meningkatkan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi serta melakukan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial dalam jangka panjang. Selain itu, pemerintah saat ini perlu meninggalkan *legacy* pembangunan sebagai landasan bagi pemerintahan berikutnya untuk lepas landas sehingga penciptaan lapangan kerja, penciptaan efek pengganda dan peningkatan produktivitas perekonomian jangka menengah-panjang tetap berkelanjutan. Memperhatikan beberapa hal tersebut, maka tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan tersebut menekankan pada pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job* serta percepatan pembangunan pembangunan infrastruktur dasar meliputi penyediaan air bersih, dan sanitasi yang layak.

Kebijakan ekonomi daerah sangat dipengaruhi kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah. Begitu juga untuk kebijakan pembangunan nasional 2023 yang menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dalam upaya transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menjadi bagian penting Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam merumuskan strategi pembangunan untuk tahun 2023. Percepatan pemulihan ekonomi menjadi upaya yang dilakukan melalui peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi daerah menjadi fokus pembangunan guna mendorong terbukanya lapangan pekerjaan, terciptanya wirausaha/UMK dan terwujudnya hilirisasi komoditi unggulan di Kepulauan Mentawai.

### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

#### 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

##### 3.1.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional

Pembangunan ekonomi tahun 2023 akan dilaksanakan dalam mendukung proses transformasi ekonomi setelah dua tahun terakhir dihadapkan pada upaya pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Tahun 2023 merupakan momentum untuk menciptakan horizon baru pembangunan dengan menekankan pada strategi mewujudkan sumber daya yang berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi perekonomian domestik, dan pemindahan IKN. Upaya peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi melalui agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3-5,9 persen pada tahun 2023. tingkat pertumbuhan tersebut akan meningkatkan nilai GNI per kapita menjadi US\$ 4.720-4.840 pada tahun 2023, dan mampu mempertahankan posisi Indonesia pada kategori *upper-middle income countries*. Tingkat inflasi dijaga stabil pada rentang 2,0-4,0 (*yoy*), dan nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada 13.500-15.000 per US\$.

Arah kebijakan dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mengejar sasaran jangka menengah panjang serta

menghadapi tantangan yang ada pasca pandemi difokuskan pada peningkatan produktivitas di seluruh sektor ekonomi, penguatan pemulihan sosial serta optimalisasi transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan sehingga akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia untuk tumbuh lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3.1  
Indikator Sasaran Pembangunan Nasional, 2023

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN	TARGET 2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3-5,9
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT (%))	5,3-6,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	7,5-8,5
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,31-73,49
5	Rasio Gini (nilai)	0,375-0,378
6	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	106-107
7	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	103-105
8	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,02

Sumber: Ranwal RKP 2023

### 3.1.1.2 Kebijakan Ekonomi Propinsi Sumatera Barat

Pemulihan ekonomi tahun 2021 terkendala masih merebaknya virus COVID-19 varian delta dan pada tahun 2022 menyebarnya varian omicron. Pelaksanaan vaksinasi yang intens dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat mengendalikan penyebaran dan menurunnya kasus kematian sehingga memberika darapan pada aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi wilayah sumatera secara agregat diperkirakan tumbuh sebesar 5,2-5,7 persen dengan memacu pertumbuhan sektor industri khususnya hilirisasi industri

berbasis komoditas unggulan dan pengembangan sektor pariwisata melalui pengembangan kawasan pariwisata berdaya saing internasional, mempercepat pemerataan pembangunan wilayah pesisir dan daerah 3T.

Tabel 3.2  
Proyeksi Indikator Makro Propinsi Sumatera Barat Tahun 2023

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,60	3,29	3,40	4,57
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	30,64	31,35	32,04	33,12
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	43,75	45,29	48,29	50,6
4	TPT (%)	6,88	6,52	6,25	5,97
5	IPM	72,38	72,65	72,74	73,18
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,47	69,59	69,80	69,98
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,02	14,09	14,05	14,06
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,99	9,07	9,18	9,28
	- Pengeluaran per Kapita (Rp.Ribu)	10.733	10.790	10.916	11.108
6	Kemiskinan (%)	6,56	6,63	5,70	5,37
7	Jumlah Penduduk Miskin	364,79	370,67	356,45	353,69
8	Gini Rasio	0,301	0,306	0,298	0,296

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 selaras dengan Visi dan Misi kepala daerah yang termuat pada RPJMD 2021-2026 yaitu difokuskan peningkatan produktivitas sehingga memberikan nilai tambah sektor strategis daerah yaitu pada sektor pertanian, perkebunan pertanian dengan meningkatkan kontribusi sebesar 5,86 persen, sektor industri pengolahan/manufaktur dengan meningkatkan kontribusi sebesar 12,46 persen serta sektor pariwisata dengan meningkatkan kontribusi sebesar 5,80 persen.

### 3.1.1.3 Kebijakan Ekonomi Daerah

Pemulihan ekonomi yang dapat dilihat dari semakin membaiknya indikator ekonomi makro secara nasional dan regional yaitu pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2022 yang positif (Nasional = 5,01 persen dan Propinsi Sumatera Barat = 3,64 persen) menunjukkan semakin terkendalnya penyebaran COVID-19 dengan berbagai intervensi kebijakan dan terakhir adalah dengan pelaksanaan vaksinasi yang secara masif dilaksanakan. Kebijakan pembangunan tahun 2023 yang fokus pada peningkatan produktivitas ekonomi dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menjadi bagian penting bagi daerah dalam pemulihan ekonomi selama terjadinya pandemi COVID-19. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi menjadi fondasi dasar dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, mengotimalkan kompetitif daerah, hilirisasi pertanian dan pengembangan sektor pariwisata unggulan daerah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai terkoreksi cukup dalam di tahun 2021 sebagai dampak COVID-19. sektor-sektor yang diprediksi produktif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap totalitas produktivitas daerah belum maksimal dalam membangun postur PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai, Namun tahun 2022 menjadi tahun akselerasi pertumbuhan ekonomi dimana aktivisasi sosial ekonomi

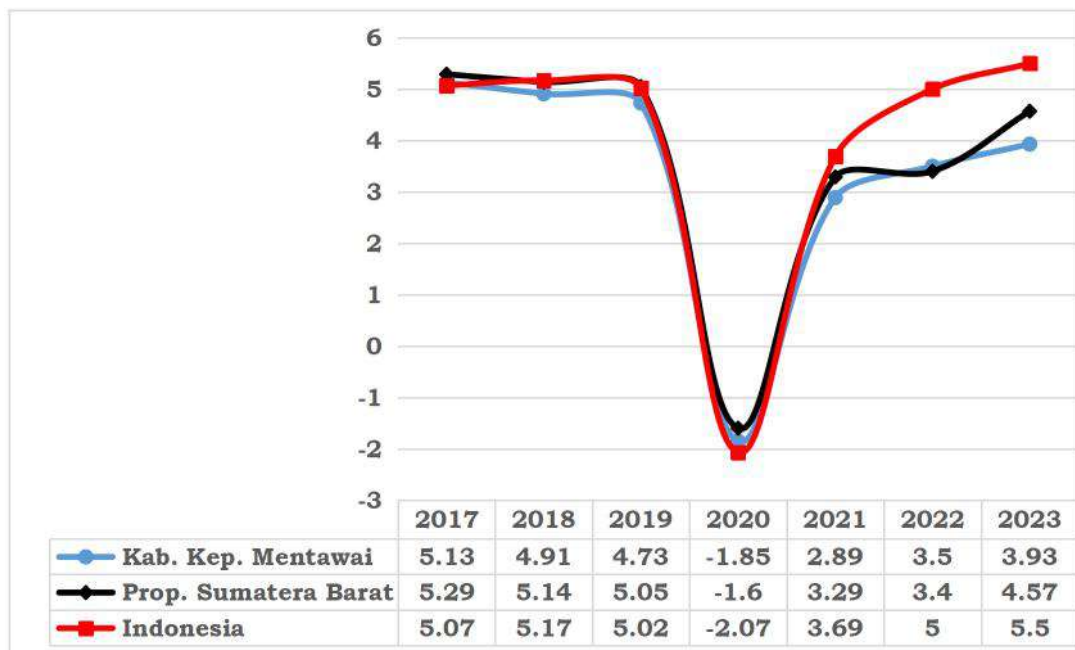


masyarakat sudah berjalan pulih seiring dengan semakin taat dan patuhnya masyarakat dalam menjalani aktivitas kehidupan normal baru terutama dengan melakukan vaksinasi.

### Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh keadaan, kondisi serta kebijakan ekonomi nasional sebagai dampak penyebaran COVID-19. Muncul dan menyebarnya varian delta COVID-19 menjadi kondisi yang memberikan dampak bagi kondisi ekonomi masyarakat, dimulainya kehidupan normal baru sebagai adaptasi kebiasaan atas pandemi COVID-19 menjadi angin segar mulai berangsur pulihnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Gambar 3.1  
Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, 2017-2023

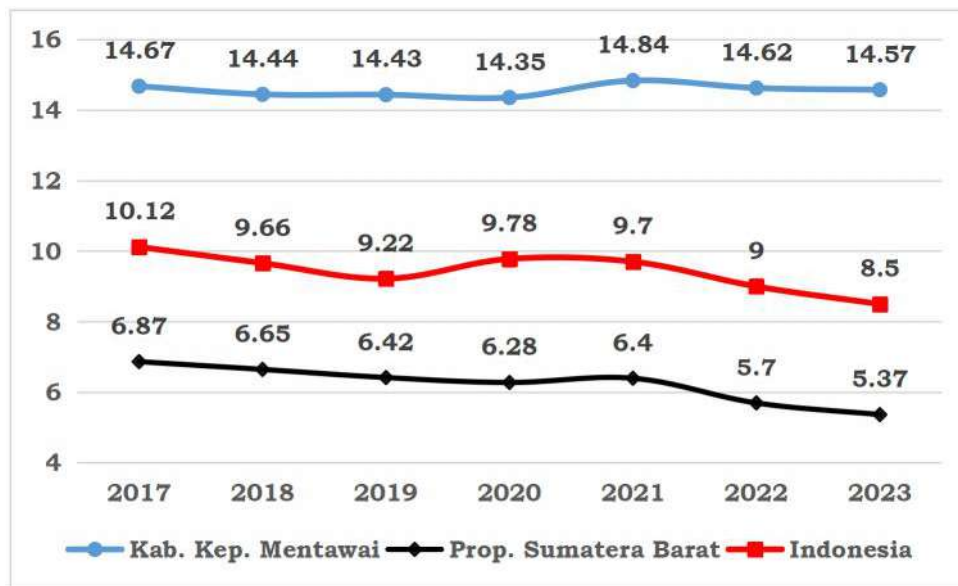


Gambar 3.1 menunjukkan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2021 sebesar 2,89 persen.

Capaian ini sudah sangat baik mengingat kondisi ekonomi masih dibayang-bayangi pandemi COVID-19 baik secara nasional hingga ke daerah, terutama jika dilihat dari capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2020 pada posisi minus 1,85 persen. Begitu juga dengan capaian pertumbuhan ekonomi Propinsi Sumatera Barat dan Nasional tahun 2021 telah bertumbuh positif yaitu pada angka 3,29 persen untuk Propinsi Sumatera Barat dan Nasional sebesar 3,69 persen.

Pengendalian penyebaran COVID-19 yang semakin baik dan pelaksanaan vaksinasi yang gencar dilaksanakan menjadi asumsi membaiknya sektor riil dan aktivitas sosial masyarakat. Akselerasi pertumbuhan ekonomi bertumpu pada kebijakan ekonomi yang mulai tampak pada tahun 2022 dan selanjutnya pada tahun 2023 sebagai kehidupan normal dan pondasi peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dan tahun 2023 diproyeksikan bertumbuh positif seiring dengan terkendalinya pandemi COVID-19 baik secara nasional juga di daerah. Tahun 2023 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai tumbuh sebesar 3,93 persen, proyeksi ini didasari potret pertumbuhan ekonomi triwulan I di Propinsi Sumatera Barat sebesar 3,64 persen dan nasional sebesar 5,01 persen dengan prediksi tahun 2023 Propinsi Sumatera Barat sebesar 4,57 persen dan nasional sebesar 5,5 persen.

Gambar 3.2  
Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi, 2017-2023



Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai secara tren penurunan belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab semakin melebarnya usaha perbaikan ekonomi masyarakat yang dapat dilihat dari tingkat kemiskinan yang meningkat di tahun 2021 yaitu sebesar 14,84 persen. Arah pembangunan nasional yang menjadi perhatian bagi daerah akan menekankan integrasi kebijakan afirmasi program-program penanggulangan kemiskinan, penyempurnaan skema pendataan penerima manfaat, dan pengembangan sistem graduasi program bantuan sosial. Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Semakin membaiknya kondisi ekonomi dan terkendalinya penyebaran COVID-19 mulai

tahun 2022 dan 2023 membuka harapan menurunnya angka kemiskinan daerah yang diperkirakan turun pada tahun 2023, begitu juga dengan capaiannya di Propinsi Sumatera Barat dan nasional. Untuk tahun 2023 diproyeksikan tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 14,57 persen dan di Propinsi Sumatera Barat sebesar 5,37 persen dan Nasional sebesar 8,5 persen.

Secara umum, gambaran perkembangan indikator makro ekonomi di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3  
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi  
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2023

Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
PDRB Per Kapita (Harga Berlaku)	Rp (dalam Juta)	53,18	54,8	56,2	58,47
PDRB Per Kapita (Harga Konstan)	Rp (dalam Juta)	33,83	34,41	35,02	35,38
IPM	indeks	61,09	61,35	61,49	61,98
Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,85	2,89	3,5	3,93
Tingkat Kemiskinan	%	14,35	14,84	14,62	14,67
Tingkat Pengangguran	%	3,98	2,79	2,77	2,75
Gini Rasio	%	0,273	0,321	0,321	0,320

### 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

Pengendalian terhadap penyebaran COVID-19 menjadi salah satu faktor utama dalam percepatan capaian pertumbuhan

ekonomi daerah, Tahun 2023 menjadi kunci mengejar pencapaian pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2023 diperkirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Potensi varian baru COVID-19, ketidakpastian global yang memengaruhi pola perdagangan dan juga potensi isu global yang berkembang hingga saat ini terutama potensi perang rusia dan NATO. Beberapa tantangan yang perlu diantisipasi dalam pembangunan tahun 2022 dan 2023 adalah:

- 1) Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi penerimaan. Hal ini akan berpengaruh pada kebijakan dana transfer ke daerah yang akan mengalami penyesuaian yang ketat sedangkan sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan masih sangat terbatas.
- 2) Kemampuan daerah dalam meredam dan mengendalikan penyebaran COVID-19 sehingga dapat memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kepastian berusaha/investasi daerah.
- 3) Optimalisasi pengembangan IPTEK dan inovasi dalam mengikuti perubahan pola perilaku konsumsi masyarakat.
- 4) Potensi pertanian, perkebunan dan perikanan yang melimpah tetapi belum memiliki nilai tambah sehingga perlu integrasi

pengembangan komoditi unggulan hulu hilir hingga pada pemasarannya.

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan ekonomi daerah sangat dipengaruhi kebijakan fiskal dan moneter yang diambil oleh pemerintah. Begitu juga untuk kebijakan pembangunan nasional 2022-2023 yang menitikberatkan pada pemulihan ekonomi sebagai akibat dari pandemi COVID-19 dan menjadi pijakan untuk reformasi struktural sebagai bentuk transformasi ekonomi nasional dan percepatan peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan keuangan nasional juga memperhatikan kondisi yang tengah terjadi secara nasional dan global, namun tetap bertumpu pada keadaan fiskal yang sehat untuk menjadikan Indonesia menjadi negara maju.

Melihat perkembangan nilai DOF Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa sedang terjadi perkembangan ekonomi yang menurun. Demikian, tingkat ketergantungan Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi dan menunjukkan tren negatif dalam aspek kemandirian. Kondisi seperti ini sebenarnya masih bisa dianggap wajar khususnya bagi daerah yang sedang berkembang yang membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan daerah.

Perkembangan DOFD Kabupaten Kepulauan Mentawai periode tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.4  
Derajat Otonomi Fiskal Daerah, 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	DOFD (%)	Pertumbuhan DOFD (%)
2017	67.862.676.598,42	917.793.849.299,42	7,39	
2018	45.358.184.273,56	913.545.022.458,56	4,97	(32,85)
2019	40.203.645.065,98	1.011.417.211.764,98	3,97	(19,94)
2020	34.905.673.555,51	832.886.813.996,51	4,19	5,43
2021	31.638.013.029,37	830.153.085.297,37	3,81	(9,06)
Rata-Rata			4,87	(14,11)

Sumber: Laporan Keuangan APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2017-2021

Pada Tabel 3.4 tampak bahwa Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Kepulauan Mentawai selama periode tahun 2017-2021 rata-rata 4,87 persen. Secara keseluruhan, DOFD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang cenderung menurun dari tahun 2017 hingga 2021. DOFD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 2017 sebesar 7,39 persen dan pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 4,97 persen dan menurun lagi hingga tahun 2021 menjadi sebesar 3,81 persen.

### 3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

1. Penguatan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui revisi peraturan daerah dan peraturan turunannya (Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah dan beberapa peraturan daerah terkait dengan retribusi (Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda

Nomor 7 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Perda Nomor 8 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga) sehingga lebih relevan, akurat dan menyesuaikan kebutuhan daerah.

2. Meningkatkan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah melalui penggunaan Teknologi Informasi/ implementasi sistem informasi *online* bekerja sama dengan Bank Nagari, serta penyederhanaan prosedur dan kedekatan pelayanan.
3. Melakukan pendataan obyek dan wajib pajak yang saat ini belum terdata, dan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan secara lebih detail, seperti: Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Keberadaan data tersebut selanjutnya digunakan untuk menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggali potensi wajib pajak daerah yang ada.
4. Melakukan koordinasi secara rutin lintas OPD yang terkait/ memiliki peran dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kegiatan sosialisasi, perbaikan mekanisme pengendalian dan pengawasan, perbaikan sistem dan prosedur administrasi pemungutan yang



cepat, sederhana dan akuntabel, serta pemberian *reward and punishment*.

6. Peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan pengelolaan/ kinerja BUMD termasuk upaya pengembangan BUMD dengan manajemen profesional dan berwawasan bisnis yang implementatif, begitu juga dengan percepatan pengelolaan RSUD melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dapat memberikan kontribusi pendapatan dari layanan kesehatan.
7. Peningkatan prestasi/ kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai indikator dalam upaya perolehan Pendapatan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), Bantuan Keuangan dan sejenisnya dalam setiap tahunnya.

Tabel 3.5  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah  
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	34.905.673.555	31.638.013.029	39.795.085.597	35.102.072.940	39.260.058.823
Pajak Daerah	3.531.794.196	3.860.497.217	6.774.251.385	6.774.251.835	7.112.963.954
Retribusi Daerah	5.976.710.358	3.033.172.955	8.976.710.358	6.283.697.251	9.425.545.876
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.591.521.757	10.684.123.854	11.589.123.854	11.589.123.854	11.927.836.423
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.805.647.244	14.060.219.003	12.455.000.000	10.455.000.000	10.793.712.569
Pendapatan Transfer	716.767.569.335	775.266.457.268	797.922.597.285	799.823.382.131	801.881.142.782
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	651.902.981.143	682.711.606.781	721.547.682.000	728.141.341.769	729.745.316.319
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	12.981.503.128	22.052.156.406	14.896.719.000	15.045.686.190	15.196.143.052
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	556.457.541.000	548.987.977.000	549.794.757.000	550.344.551.757	550.894.896.309
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	49.701.316.885	69.985.666.825	82.004.624.000	82.824.670.240	83.652.916.942
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	32.762.620.130	41.685.806.550	74.851.582.000	74.926.433.582	75.001.360.016
Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000
DID	-	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
Dana Desa	57.229.421.106	60.246.587.200	44.929.317.000	45.378.610.170	45.832.396.272
Dana Desa	57.229.421.106	60.246.587.200	44.929.317.000	45.378.610.170	45.832.396.272
Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.303.430.192	32.308.263.287	31.445.598.285	26.303.430.192	26.303.430.192
Pendapatan Bagi Hasil	29.303.430.192	32.308.263.287	31.445.598.285	26.303.430.192	26.303.430.192
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	29.303.430.192	32.308.263.287	31.445.598.285	26.303.430.192	26.303.430.192
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	81.213.571.106	23.248.615.000	6.817.957.663	6.817.957.663	6.817.957.663
Hibah		23.248.615.000	-	-	-
Dana Darurat		-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan perUndang-undangan	81.213.571.106	-	6.817.957.663	6.817.957.663	6.817.957.663
<b>PENDAPATAN</b>	<b>832.886.813.996</b>	<b>830.153.085.297</b>	<b>844.535.640.545</b>	<b>841.743.412.734</b>	<b>847.959.159.268</b>

### 3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

1. Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.
2. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
3. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.
4. Belanja daerah dialokasikan untuk mendanai program prioritas pembangunan daerah diantaranya Pembangunan Pendidikan (Mentawai Cerdas), Pembangunan Kesehatan (Mentawai Sehat), Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Perdesaan Perkotaan dan Konektivitas (Mentawai Mantap), Pembangunan Kawasan Perumahan dan Permukiman (Mentawai Bersih), Pembangunan Pertanian Terpadu, Ketahanan Pangan dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai Berdaya Saing), Pembangunan Pariwisata (Mentawai Emas), Pembangunan Usaha Kecil Menengah (Mentawai Kerja), Kedaulatan Energi (Mentawai Terang), Pembangunan

Kebudayaan (Mentawai Beradab), Penataan Birokrasi (Mentawai Prima).

5. Melakukan koordinasi (kontrol) secara rutin dengan seluruh OPD dan *stakeholder* untuk mendorong peningkatan penyerapan anggaran dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan belanja daerah (efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja).

Tabel 3.6  
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah  
Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Proyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
Belanja Operasi	539.416.327.902	544.000.215.852	621.907.626.848	605.933.317.573	571.351.056.492
Belanja Pegawai	247.582.508.950	284.566.995.633	325.003.701.706	334.308.699.947	317.593.264.949
Belanja Barang dan Jasa	280.774.442.528	243.479.793.619	273.144.346.431	252.337.706.044	231.311.197.198
Belanja Bunga		-	-	-	-
Belanja Subsidi	6.734.707.000	9.585.794.613	11.000.000.000	6.000.000.000	11.000.000.000
Belanja Hibah	3.853.184.836	5.491.419.256	11.262.328.711	12.388.561.582	10.530.277.345
Belanja Bantuan Sosial	471.484.588	876.212.731	1.497.250.000	898.350.000	916.317.000
Belanja Modal	142.003.462.707	164.639.582.130	157.012.401.692	157.012.401.692	183.940.111.849
Belanja Modal Tanah	-	-	50.000.000	50.000.000	2.500.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.871.620.930	25.876.770.459	25.527.441.782	25.527.441.782	25.054.001.289
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.557.717.902	21.708.856.761	40.977.132.611	40.977.132.611	43.886.509.026

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Tahun Berjalan 2022	Poyeksi/Target pada Tahun	
				2023	2024
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.035.794.152	115.471.089.584	87.867.827.299	87.867.827.299	111.152.801.533
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.538.329.723	1.582.865.326	2.590.000.000	2.590.000.000	1.346.800.000
Belanja Tidak Terduga	24.195.818.997	1.587.597.109	2.220.398.523	12.485.992.060	1.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	24.195.818.997	1.587.597.109	2.220.398.523	12.485.992.060	1.000.000.000
Belanja Transfer	115.966.872.197	119.166.749.510	103.473.560.773	103.473.560.773	104.016.596.381
Belanja Bagi Hasil	1.563.200.931	2.446.929.619	1.575.096.173	1.575.096.173	1.575.096.173
Belanja Bantuan Keuangan	114.403.671.266	116.719.819.891	101.898.464.600	101.898.464.600	102.441.500.208
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>705.615.609.606</b>	<b>829.394.144.601</b>	<b>884.613.987.836</b>	<b>878.905.272.098</b>	<b>860.307.764.721</b>

### 3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan diutamakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dimana jumlahnya semakin menurun yang dialokasikan untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan program-program prioritas pembangunan di daerah.
2. SILPA tahun berjalan dijadikan sebagai pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan anggaran (surplus/defisit). Apabila SILPA tahun berjalan yang dihasilkan positif/surplus, maka pemerintah daerah dapat memanfaatkan untuk menambah program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/ atau pengeluaran pembiayaan. Sedangkan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif, maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/ atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.



Tabel 3.7  
 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah  
 Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2020-2024

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Proyeksi/Target pada Tahun	
	2021	2021	2022	2023	2024
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.950.726.933	32.987.630.424	42.078.347.291	37.161.859.364	15.348.605.453
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	29.950.726.933	32.987.630.424	42.078.347.291	37.161.859.364	15.348.605.453
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.950.726.933	32.987.630.424	42.078.347.291	37.161.859.364	15.348.605.453
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	2.000.000.000	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	-	-	2.000.000.000	-	3.000.000.000
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-

Uraian	Jumlah Dalam Rupiah				
	Realisasi	Realisasi	Tahun Berjalan	Poyeksi/Target pada Tahun	
	2021	2021	2022	2023	2024
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	2.000.000.000	-	3.000.000.000
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	29.950.726.933	32.987.630.424	40.078.347.291	37.161.859.364	12.348.605.453